



**EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NO 53
TAHUN 2011 TENTANG GERAKAN SEGORO AMARTO DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Patma Tuasikal ^{1*}, Sunarso ¹

¹Universitas Negeri Yogyakarta

¹Jl. Colombo No. 1, Depok, Sleman 55281, Yogyakarta, Indonesia

* Corresponding Author. Email: fatma.tuasikal90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kesesuaian Program Gerakan Segoro Amarto (PGSA) dengan kebutuhan masyarakat, mengungkapkan implementasi PGSA berdasarkan dampak sosial ekonomi untuk mengetahui kendala implementasi PGSA di Kota Yogyakarta. Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan evaluasi program model CIPP. Penentuan subjek teknik *purposive*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi. Analisis data interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan: (1) PGSA dilaksanakan karena kepadatan penduduk masih tinggi, tingkat kemiskinan relatif besar, pergeseran nilai gotong royong, (2) Implementasi PGSA meliputi; sosialisasi, pendataan/pemetaan, penyaluran dana, pengambilan dana, penggunaan dana, monitoring/evaluasi, pelaporan, 3) Dampak sosial ekonomi cukup baik pada hubungan lingkungan sosial budaya, berkembangnya usaha ekonomi, memberantas kemiskinan, peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, 4) Kendalanya, kurang adanya komunikasi yang baik, sosialisasi program terlalu cepat, bertumpuknya program masyarakat, usulan tanah program sulit terealisasi, kurang adanya pemanfaatan dana, kurang meratanya daya dukung masyarakat.

Kata kunci: *gerakan segoro amarto, penanggulangan kemiskinan*

***AN EVALUATION OF YOGYAKARTA MAYOR REGULATION NO.53 OF 2011
CONCERNING THE MOVEMENT OF SEGORO PROGRAM IN POVERTY REDUCTION***

Abstract

This study aims to evaluate the suitability SAMP with the community needs, as well as revealing SAMP implementation based on socio-economic impacts to determine SAMP implementation constraints in the city of Yogyakarta. The study used a model of CIPP program evaluation approach developed. The subjects purposive technique. The data collected using interview, documentation, and observation. analyzed using the interactive model. The results showed: (1) implemented SAMP because the population density is still high, poverty rate is still relatively large, the value of mutual cooperation. (2) The implementation SAMP include; dissemination, data collection / mapping, disbursement of funds, the withdrawal of funds, use of funds, monitoring / evaluation, reporting, (3) socio-economic effects quite well on the relationship socio-cultural environment, development of the economy, eradicate poverty, education health, improving health, (4) the constraints, lack of good communication, socialization program too quickly, the accumulation of the public program, the proposed program of land difficult to be realized, lack of utilization of the funds, uneven community supports.

Keywords: *segoro amarto movement program, poverty reduction*

Pendahuluan

Kemiskinan muncul sebagai problema sosial yang kronis bagi bangsa Indonesia. Permasalahan ini menyebabkan terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sulit terealisasi. Untuk mengatasi hal demikian perlu adanya pertumbuhan ekonomi semakin baik dalam kehidupan dunia, ini ditegaskan dalam pandangan *World Bank* (2013) mengenai pertumbuhan ekonomi yang cepat diakui sebagai salah satu suksesnya global ekonomi dunia secara relatif, terinci dalam mengatasi kemiskinan, seperti di negara Turki tahun 2003-2008. Penanggulangan kemiskinan di negara Turki menggunakan metode dekomposisi kemiskinan, sehingga penurunan kemiskinan absolut sebagian besar berada dalam perubahan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional (Sirma, Jenkins, 2013, p. 1).

Selain penurunan kemiskinan multidimensional juga sebagai gejala kemiskinan yang meliputi aspek primer berupa miskin aset-aset organisasi sosial, politik, pengetahuan serta keterampilan, aspek sekunder berupa miskin jaringan sosial sumber-sumber kewenangan dan maklumat. Dimensi kemiskinan tersebut memanasifasikan dirinya dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan tidak sehat, kesehatan kurang baik, dan pendidikan tidak memadai. Karena itu, dimensi kemiskinan membuat jutaan anak tidak bisa mengenyam pendidikan berkualitas, kesulitan membiayai kesehatan, kurangnya tabungan, kurangnya lapangan pekerjaan, kurangnya jaminan sosial, dan tidak adanya investasi, sebab kemiskinan juga menyebabkan masyarakat kurang memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan secara terbatas (Tantoro, 2014, p.36).

Badan Pusat Statistik 2015 tentang indikator kesejahteraan sosial, tingkat penurunan kemiskinan hanya mencapai 0,3%. Ini merupakan hasil terkecil selama empat periode terakhir. Meskipun pemerintah telah berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dari 29,13 juta jiwa atau 11,96% pada Tahun 2012 menjadi 28,59 juta jiwa atau 11,22 % pada Maret 2015. Jika dibandingkan Tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 310 ribu jiwa dari tahun 2014 dan 520 ribu jiwa dari tahun 2013. (Badan Pusat Statistik, 2015b, pp.119-120)

Data menunjukkan penanggulangan kemiskinan menjadi suatu permasalahan sulit di atasi, meskipun pemerintah banyak melakukan berbagai program-program baik dari Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Daerah. Untuk jelasnya dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah penduduk miskin di Indonesia (2000-2015)

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Juta orang)		
		Kota	Desa	Kota+ Desa
1	2010	11,1	19,3	31,02
2	Maret 2011	11,05	18,97	30,02
3	Sep-2011	10,95	18,94	29,89
4	Mar-2012	10,65	18,49	29,13
5	Sep- 2012	10,51	18,09	28,59
6	Mar- 2013	10,33	17,74	28,07
7	Sep-2013	10,63	17,92	28,55
8	Mar-2014	10,51	17,77	28,28
9	Sep-2014	10,36	17,37	27,73
10	Maret-2015	10,65	17,94	28,59

Sumber: Badan Pusat Statistik, Indonesia (2015a)

Tabel 1 menunjukkan salah satu dampak kebijakan pembangunan masa Orde Baru bersifat sentralistik, birokratik, yang bersifat seragam untuk seluruh bangsa Indonesia. Model pembangunan semacam ini dapat menghancurkan model sosial dan budaya lokal, sebagai suatu kekuatan utama masyarakat dalam mengembangkan keswadayaan untuk mencapai kehidupan lebih baik. Kondisi tersebut menunjukkan pemerintah melakukan berbagai cara menanggulangi kemiskinan, seperti diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah menetapkan program perlindungan sosial meliputi: Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia pintar (PIP), dan Program Indonesia Sehat (PIS). Kemudian pelaksanaan programnya pemerintah menerbitkan kartu identitas bagi penerima Program Perlindungan Sosial atau PPS (Presiden Republik Indonesia, 2014).

Konsep ini, jika dilihat hasil penelitian Wodon (1999, p. 9) tentang penanggulangan kemiskinan di negara Bangladesh dengan cara regional data panel internasional, dengan tujuan menganalisis pertumbuhan jumlah pendu-

duk pada 14 wilayah geografis dalam kurung waktu 1983-1996. Cara ini dilakukan agar mudah menanggulangi angka kemiskinan. Di sisi lain Supriyanto (2006, p. 2) menjelaskan dalam penanggulangan kemiskinan pemerintah memberi izin usaha untuk mendorong adanya usaha mikro kecil dengan cara memberi bantuan permodalan bagi si miskin yaitu 5,5 juta modal usaha notabennya 96% dan pembinaan UKM, serta mengadakan program kebijakan wajib belajar 9 tahun ditingkatkan menjadi 12 Tahun.

Program penanggulangan kemiskinan masih sulit diatasi sampai saat ini. Namun, ada keberhasilan yang dicapai dalam program pengentasan kemiskinan meskipun tidak maksimal. Hal ini berdasarkan hasil penelitian Lasmawan & Suryadi (2012, p. 65) bahwa program penanggulangan kemiskinan di Kota Bali lebih mengoptimalkan lembaga-lembaga sosial dan budaya masyarakat setempat, sehingga menjadi urat nadi bagi semua program yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat. Namun kendalanya adalah pada masyarakat di Kota Bali hampir 52,7 % masyarakat miskin perkotaan di Provinsi Bali adalah masyarakat pendatang dari luar, sehingga hal tersebut menjadi pemicu tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penanggulangan kemiskinan akan berdampak baik apabila program yang dilakukan lebih menyentuh aspek lokalitas, hal demikian sesuai penelitian yang penulis lakukan, sebab penanggulangan kemiskinan selama ini kurang menyentuh aspek lokalitas. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta mencoba menyusun suatu kebijakan program yang diluncurkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, pada tanggal 24 Desember 2010, dengan berfokus pada perubahan sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kegiatan menanggulangi kemiskinan yang ada dalam konsep Program Gerakan Segoro Amarto, yaitu Kemandirian, Kedisiplinan, Kepedulian, dan tanggung jawab, yang telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan (Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta, 2013, p. 3).

Program Gerakan Segoro Amarto merupakan semangat *gotong royong agawe majune Ngayogyakarta*, yang artinya semangat gotong royong untuk kemajuan Yogyakarta de-

ngan menggambarkan semangat yang menggelora terus menerus dan tidak kenal menyerah serta di dalamnya ada ketenangan. Amarto dalam kisah pewayangan adalah negara yang melambangkan kebaikan berupa sifat masyarakat dan pemimpin yang dapat diteladani. Secara filosofi Segoro Amarto dapat dimaknai sebagai semangat bersama untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di lingkungannya, kampungnya, kelurahannya, kota ataupun negara. Memiliki sifat ini yang dapat menampung semua permasalahan sebagaimana menerima limpahan air yang sangat kotor dari daratan. Segoro Amarto sebagai tempat hidup dan menghidupi (sumber daya alam dengan segala kekayaannya) dan merupakan sarana interaksi dan transformasi antara bangsa dan budaya.

Peraturan Walikota Yogyakarta No, 53 Tahun 2011 (Walikota Yogyakarta, 2011) diimplementasikan merupakan suatu kebijakan publik yang diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta, sebab kebijakan publik merupakan *this choice is based on values and norms. Policies are aimed at bridging the gap between these values and norms and a situation*. Artinya kebijakan publik sebagai pilihan pemerintah dalam menanggapi masalah politik atau masalah umum, didasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma (Geurts, 2014, p.6).

Konsep di atas, ditegaskan juga oleh Michaud (2011, p.1) bahwa kebijakan publik menekan pada proses memutuskan tindakan publik dalam menangani masalah oleh aktor pemerintah maupun swasta dengan memerlukan intervensi. Sedangkan Lynam (2006, p. 7) mengatakan sasaran pemerintah tercapai apabila kebijakan mengarah pada nilai, tujuan, serta sasaran pemerintah karena kebijakan publik secara umum dipahami sebagai keputusan dasar, undang-undang, tindakan, komitmen, pelaksanaan program pendanaan dengan prioritas dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Oleh sebab itu, kebijakan publik tidak terlepas dari putusan pemerintah. Hal ini, ditegaskan Capano & Howlett (2015, p. 2) bahwa.

“..Public policies are the result of efforts made by governments to alter aspects of their own or social behaviour in order to carry out some end or purpose and are comprised of complex arrangements of policy goals and policy means. In this view policy design involves the effort to more or less systematically develop efficient and effective policies through the

application of knowledge about policy means gained from experience, and reason, to the development and adoption of courses of action that are likely to succeed in attaining their desired goals or aims within specific policy context..”

Artinya, kebijakan publik sebagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengubah aspek perilaku sosial dalam rangka melaksanakan tujuan akhir, terdiri atas pengaturan secara kompleks serta tujuan maupun sarana kebijakan publik. Karena pandangan desain kebijakan melibatkan upaya untuk lebih sistematis, efektif dan efisiensi dalam mengembangkan kebijakan melalui penerapan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman, pengembangan, penerapan, dan tindakan program yang berhasil dalam mencapai tujuan sesuai dengan keinginan konteks kebijakan tertentu.

Program yang berhasil mencapai tujuan implementasi kebijakan sesuai sasarannya, karena implementasi kebijakan berkaitan dengan pemerintah berproses dalam menentukan sesuatu yang direncanakan, ini disebabkan sifat implementasi dipahami dari berbagai dimensi. Tahapan pelaksanaan kebijakan berupa proses sederhana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun, proses kebijakan sederhana itu justru tidak sederhana sebab pelaksanaan kebijakan melibatkan penjabaran lebih lanjut mengenai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh pejabat atau instansi pelaksana (Hamdi, 2014, p. 97).

Kemudian pandangan Van Meter & Van Horn (Paudel, 2009, p. 5) bahwa Implementasi kebijakan meliputi tindakan-tindakan individu publik dan swasta maupun kelompok yang diarahkan untuk pencapaian tujuan sebagaimana ditetapkan dalam kebijakan sebelumnya. Hal ini menyiratkan aktor sebagai pandangan paling relevan dengan suatu kebijakan efektif sesuai yang diinginkan.

Kebijakan yang efektif terlaksana apabila hasil evaluasi program kebijakan menunjukkan hasil yang maksimal, karena evaluasi kebijakan menurut (Fischer, Miller, & Sidney, 2015, p. 412) adalah pengetahuan berdasarkan keyakinan yang diterima secara konsensus, bukannya pada pertikaian. Namun, bukti dan demonstrasi menjadi penting untuk memastikan keyakinan mendominasi proses pemahaman retrospektif. Sebab pendekatan digunakan dalam evaluasi kebijakan bersifat argumentatif

dikarenakan kenyataan dilapangan pada tingkat evaluasi dianggap sebagai hasil dari mobilisasi yang dilembagakan. Untuk itu, evaluasi mencerminkan proses kebijakan penyusunan agenda, dalam mengungkapkan masalah. Sedangkan Martens (2010, p.49) mengatakan evaluasi merupakan proses penyelidikan yang ditetapkan untuk mengumpulkan dan mensintesis bukti tentang keadaan, nilai, prestasi, makna atau kualitas dari sebuah program, produk, orang, kebijakan, usulan atau terencana.

Di sisi lain, Fitzpatrick, Sanders, & Worthen (2011, p.7) bahwa “.....evaluasi as the identification, clarification, and application of defensible criteria (worth or merit) in relation to those criteria”. Maksudnya evaluasi sebagai proses mengidentifikasi untuk mengetahui layak tidaknya suatu objek evaluasi sesuai kriteria yang ditetapkan. Sebab evaluasi adalah proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan program, proyek, atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan.

Keberhasilan para pemangku kepentingan adalah berhasil mewujudkan program yang dilaksanakan, untuk kepentingan masyarakat yaitu, suatu gerakan sosial dalam penanggulangan kemiskinan. sebab pandangan Mosse 2010 dikutip Bebbington, Mitlin, Mogaladi, Scurrah, & Bielich, 2010, p. 1305) bahwa gerakan sosial penanggulangan kemiskinan dilaksanakan saat ini sedikit, sehingga kemiskinan yang terjadi saat ini hanya berbasis identitas yang dijadikan sebagai suatu negosiasi. Oleh sebab itu akar penyebab kemiskinan hanya berkaitan dengan hubungan kekuasaan dan kebijakan yang ditetapkan oleh politik dan diskursif yang ditanamkan. Di perkuat hasil penelitian vom Hau & Wilde (2010, p. 1298) bahwa gerakan sosial adalah suatu alternatif dalam menghadapi kendala sosial ekonomi, ekologi, politik, dan memobilisasi dalam melawan kemiskinan, sebab upaya dalam mobilisasi tetap berdampak pada fragmentasi lokal yang terkandung dalam wacana publik dan pembuat kebijakan. Oleh sebab itu, berbagai program dilakukan untuk melawan kemiskinan, salah satunya hasil penelitian yang diungkapkan oleh (Baum & Duvnjak, 2013, p.12) sebagai berikut.

..”We examine public policy responses to poverty and note that public discourse has

largely moved from using the concept of poverty to using that of social exclusion. The main Australian policy responses are welfare payments and support for public housing. We note that welfare payments to the unemployed have become progressively less generous and more conditional in the past two decades. The introduction of conditionality in welfare is supported by both major parties. The prospects for reducing poverty are considered and the principle mechanism is presented as redistributive policies through progressive taxation regimes. The paper concludes with a consideration of advocacy for poverty reduction.”

Artinya, Penanggulangan kemiskinan di Australia dilakukan dengan sistem pemeriksaan respon kebijakan publik, dengan catatan wacana publik sebagian besar melihat konsep kemiskinan menggunakan pengucilan sosial. Di Australia respons kebijakan tentang pembayaran untuk kesejahteraan dan dukungan perumahan rakyat. Dengan demikian, pembayaran kebutuhan dan para penganggur telah menjadi semakin kurang dekade terakhir. Pengenalan persyaratan kesejahteraan didukung oleh kedua pihak. Prospek untuk mengurangi kemiskinan dianggap mekanisme prinsip yang disajikan sebagai kebijakan redistributif melalui rezim pajak progresif. Oleh sebab itu disimpulkan bahwa kandungan pertimbangan advokasi untuk pengurangan kemiskinan.

Konsep dasar dari penelitian ini adalah melihat masalah kemiskinan yang bersifat multidimensi. Sebab masalah kemiskinan tidak hanya terkait dengan masalah ekonomi, tetapi berhubungan dengan budaya dalam kehidupan masyarakat yang menyentuh aspek lokalitas, sehingga penanggulangan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Namun, menjadi tanggung jawab seluruh elemen dalam masyarakat. Oleh karena itu yang menjadi masalah dasar dalam penelitian, bagaimana mengevaluasi peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 tahun 2011 tentang Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program model CIPP dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikembangkan

Stufflebeam (1986) untuk membantu pembuat kebijakan (*policy maker*) dalam penelitian program Gerakan Segoro Amarto Kota Yogyakarta tentang penanggulangan kemiskinan

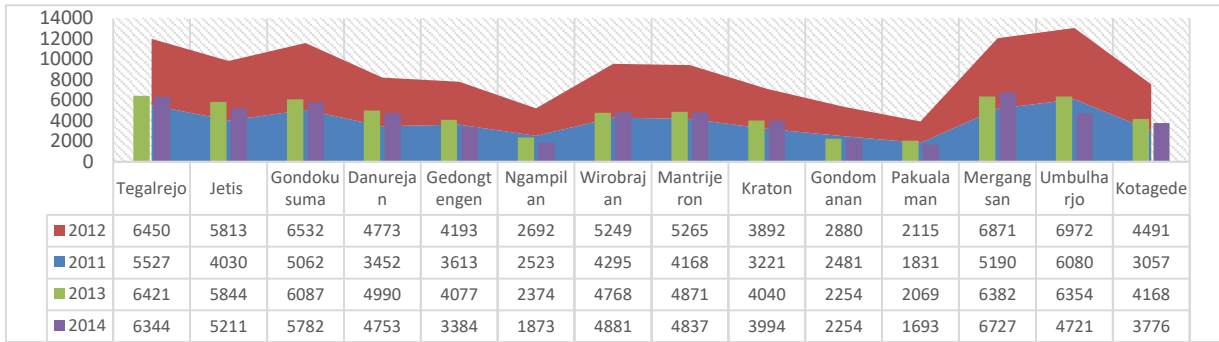
Pengambilan data menggunakan teknik *purposive* yang terdiri dari TKPK Kota Yogyakarta dan 3 TKPK Kelurahan, Ketiga Kelurahan tersebut sebagai sasaran penerima PGSA yang dilakukan pada 9 RW. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan penelitian dilakukan pada Kelurahan Kricak, Kelurahan Tegal Panggung dan Kelurahan Sorosutan Kota Yogyakarta.

Unit penelitian ini bersifat selektif yaitu orang-orang yang terlibat langsung dalam program pelaksanaannya, pada 3 Kelurahan yang dijadikan sebagai *pilot project* Program Gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta. Untuk itu, diharapkan 3 Kelurahan dengan memfokuskan pada pengurus RW yang terdiri atas, 3 dari Kelurahan Tegal Panggung dan 3 dari Kelurahan Sorosutan serta 3 dari Kelurahan Kricak. Ditambah 1 Ketua SKPD Kecamatan, Ketua TKPK Kota, 3 TKPK Kelurahan dan 3 Masyarakat.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kesesuaian Program Gerakan Segoro Amarto dengan kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta dilihat berdasarkan tingkat kemiskinan semakin tinggi pada Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo, Kelurahan Tegal Panggung Kecamatan Danurejan, dan Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo. Untuk lebih jelasnya dilihat pada Gambar 1.

Grafik perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Yogyakarta berdasarkan jumlah penduduk miskin tingkat Kecamatan. Tahun 2011 jumlah penduduk miskin Kecamatan Tegalrejo 5527, Kecamatan Danurejan 3452, dan Kecamatan Umbulharjo 6080, ini menjadi alasan pemerintah untuk melakukan *pilot project* Program Gerakan Segoro Amarto pada ketiga Kecamatan tersebut dengan sasarannya Kelurahan Tegal panggung, Kelurahan Kricak, dan Kelurahan Sorosutan, setelah program dilaksanakan sampai 2014 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 4721 pada Kecamatan Umbulharjo, sedangkan Kecamatan Tegalrejo mengalami kenaikan menjadi 6344 dan Kecamatan Danurejan mengalami penurunan menjadi 4753 jiwa.



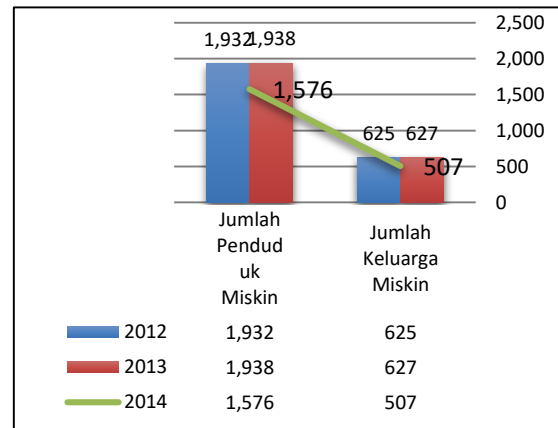
Gambar 1. Jumlah Penduduk Miskin Per Kecamatan di Kota Yogyakarta 2011-2014 (Dinsostrans, 2015)

Pergeseran nilai gotong royong dalam masyarakat Kota Yogyakarta hampir hilang diakibatkan dampak dari perkembangan globalisasi, sehingga masyarakat bersifat individualisme kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin. Padahal masyarakat Kota Yogyakarta dikenal sebagai masyarakat yang memiliki sikap ramah, kekeluargaan dan nilai-nilai budaya yang semakin tinggi. Maka untuk menyelesaikan problema sosial dibutuhkan sikap gotong royong.

Hal demikian berakibat pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat Kota Yogyakarta hampir punah, meskipun tidak secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Yogyakarta melaksanakan PGSA dalam penanganan kemiskinan untuk memunculkan kembali nilai-nilai gotong royong yang berlandas pada nilai kepedulian, kedisiplinan, tanggungjawab serta kemandirian yang kurang berdampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga penanganan kemiskinan bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan tanggung seluruh masyarakat Kota Yogyakarta. Ini diungkapkan oleh TKPK Kelurahan Sorosutan bahwa, “Dengan melihat keberadaan pengaruh globalisasi masyarakat malu kalau dibilang ketinggalan jaman, jadul, tidak semua konsep budaya sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kepadatan penduduk mengakibatkan lapangan kerja terbatas, dan kebutuhan hidup semakin meningkatkan. Karena jumlah penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2010 berkisar 388,627 atau 11,24%, Tahun 2011 sebesar 390,553 atau 11,20% sedangkan Tahun 2011 jumlah penduduk sebesar 394,553 atau 11,21%. Sedangkan jumlah penduduk Tahun 2015 pada ketiga kelurahan Tegal Panggung sebesar

9,225 jiwa, Kelurahan Kricak 13.005 sedangkan Kelurahan Sorosutan sebesar 14,619 jiwa. Kepadatan penduduk mengakibatkan dilaksanakan PGSA pada ketiga Kelurahan tersebut. Untuk jelas dilihat salah satu grafik jumlah penduduk pada Kelurahan Kricak.



Gambar 2. Penduduk Miskin dan Keluarga Miskin Kelurahan Kricak

Implementasi Pelaksanaan PGSA di Kota Yogyakarta meliputi; *Pertama* sosialisasi PGSA melalui TKPK Kota disosialisasikan kepada pengurus TKPK Kelurahan, TKPK Kelurahan mensosialisasikan kepada RW/RT, dan RW/RT mensosialisasikan kepada masyarakat maupun sasaran penerima program. Hal ini ungkapkan oleh Kelurahan Tegal Panggung sebagai berikut. “..Sosialisasi dilakukan pemerintah secara berkala dan diteruskan melalui pengampu wilayah seperti RT/RW, baik melalui momen-momen tertentu maupun kegiatan rutin seperti pertemuan warga.”

Diungkapkan juga oleh TKPK Kota Yogyakarta bahwa, “..Sosialisasi dilapangan dilakukan melalui koordiansi TKPK Kota kepada Kelurahan dan berkelanjutan secara ber-

sinergi sampai pada tingkat RT/RW maupun basis masyarakat..”

Pendataan dan pemetaan PGSA dilakukan bukan hanya berdasarkan Kartu Miskin (KMS). Namun berdasarkan kesiapan masyarakat dalam menggunakan dana yang diberikan karena program ini bersifat dana bergulir. Hal ini di ungkapkan oleh penerima dana program PGSA bahwa “Program ini dilaksanakan karena saat itu, pengangguran cukup banyak di kalangan pemuda”

Penyaluran Dana PGSA dilakukan apabila memenuhi beberapah syarat antara lain; memenuhi persyaratan administrasi, kelompok atau sasaran wajib membuka rekening atas nama kelompok pada Bank BPD DIY cabang Yogyakarta, pencairan dilakukan dengan sistem transfer rekening antara TKPK Kelurahan dengan kelompok Program Gerakan Segoro Amarto., Persyaratan dari Bank minimal 2 (dua) orang terdiri dari ketua dan bendahara kelompok.

Data dilapangan menunjukan penyaluran dana yang dilakukan cukup singkat mulai tahap I sampai tahap III, seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Tahap Penyaluran Dana Pada Program Gerakan Segoro Amarto Tahun 2011

No	Tahap	Tahun	%	Jumlah
1	I	Juni 2011	40	120.000.000
2	II	Juli 2011	45	175.000.000
3	III	Agustus 2011	15	85.000.000
Total			100	500.000.000

Sumber: TKPK Kelurahan Sorosutan

Penyaluran dana dilakukan cukup singkat, disebabkan PGSA belum terdapat Standar Operasional (SOP) dan Badan Operasional (BOP), sehingga berlandas pada SOP dan BOP TKPK. Hal ini diungkapkan oleh TKPK Kelurahan Kricak sebagai berikut. “..Anggaran Program Gerakan Segoro Amarto setelah diterima hampir 3 bulan tidak digunakan, karena belum ada petunjuk teknis, sehingga ditunggu sampai petunjuk teknis dari Pemerintah Daerah turun baru dipergunakan.

Pengambilan Dana PGSA dilakukan dengan memenuhi beberapah hal antara lain; perlu adanya pembentukan kelompok sebelum pengambilan dana, setiap kelompok minimal beranggotakan 5 (lima) orang, serta tidak per-

nah bermasalah pada program-program bantuan modal lainnya, sebelum pengambilan dana setiap kelompok telah mengajukan proposal rencana usahanya dan telah dilakukan verifikasi kelayakan oleh TKPK Kelurahan, setiap kelompok telah melakukan teknis tentang kegiatan usaha yang akan dilakukannya.

Diungkapkan juga oleh TKPK Kota Yogyakarta bahwa. “..Pengambilan dana dilakukan melalui 3 tahap dengan ketentuan apabila pada pengambilan dana tahap I tidak dipergunakan dengan baik maka, tahap 2 dan 3 tidak dapat diambil, kemudian pengambilan dana melalui transfer langsung ke rekening, masing-masing kelompok. Hal demikian bertujuan untuk mencegah penyalagunaan dana..”

Penggunaan Dana PGSA pada Program Gerakan Segoro Amarto perlu memperhatikan beberapah syarat antara lain: dalam penggunaannya harus dihindari semangat-semangat pemborosan, aji mumpung, menghabiskan dana, bagi rata, serta kegiatan kegiatan lain yang tidak terarah dan tidak sesuai dengan prioritas permasalahan yang ada di masyarakat, penggunaan dana harus tepat sasaran dengan tujuan membantu masyarakat miskin agar dapat melepaskan diri dari kemiskinannya secara mapan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik., Penggunaan dana harus berkelanjutan, berarti tidak menjadi habis. Dalam jangka panjang penerima bantuan mampu mengembalikan apa yang pernah diterimanya (meskipun dalam bentuk lain) agar dapat terus dimanfaatkan oleh penerima-penerima selanjutnya. Segala pengambilan keputusan Gerakan Segoro Amarto wajib berdasarkan atas rembung warga dan disetujui secara mufakat oleh semua unsur yang ada di masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesamaan hak bagi setiap warga negara untuk melaksanakan kegiatan Program Gerakan Segoro Amarto.

Berdasarkan asas transparansi, akuntabel dan responsibel, mengutamakan *outcome*, bukan sekedar output, mengutamakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ekonomi, mampu menargetkan penurunan angka kemiskinan minimal 20% (lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, dan wilayah pengoptimalisasian dana adalah untuk mengurangi kemiskinan yang disesuaikan dengan identifikasi permasalahan yang ada di wilayah tersebut.

Data di lapangan menunjukan penggunaan dana tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini diungkapkan penerima

PGSA kelurahan Tegal Panggung sebagai berikut. “..Saya mau menyetor uang 250.000 per bulan pada Bapak sekertaris, namun waktu itu balai Kelurahan direnovasi, kata Bapaknya nanti saja, jadi dari Tahun 2011 sampai saat ini saya baru setor 3 bulan 750.000..”

Monitoring dan evaluasi tujuan utama adanya monitoring dan evaluasi pada Program Gerakan Segoro Amarto antara lain; agar dalam pelaksanaan mendapatkan pendampingan penuh baik dari TKPK Kota maupun TKPK Kelurahan, monitoring dilakukan secara terus menerus setiap saat dan akan dilihat progres pelaksanaannya setiap 3 bulan sekali, evaluasi dilaksanakan secara berkala pada tiap semester dan menjadi masukan dalam pelaksanaan selanjutnya

Data di lapangan menunjukkan perlu adanya monitoring pada pelaku utama PGSA, sebab daya dukung masyarakat memiliki kepedulian antara sesama setelah adanya PGSA, hanya kurang adanya kepedulian dari pengusaha lokal. Ini diungkapkan oleh TKPK Kelurahan Tegal Panggung sebagai berikut. “..Kenyataan yang terjadi sampai saat ini sangat sulit mengajak para pengusaha lokal untuk ikut berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat mereka masih mempunyai sifat egosentris masih tinggi..”

Pelaporan, Peraturan Gubernur Daerah Istimewah Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2010 yang menegaskan, laporan pertanggungjawaban merupakan laporan penggunaan sesuai dengan proposal yang diajukan, kwitansi penggunaan dan bukti-bukti pendukung lainnya, wajib menyampaikan surat pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui SKPD teknis (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi), penggunaan dana diaudit oleh Aparat Pengawas Fungsional.

Data lapangan menunjukkan laporan anggaran yang digunakan dalam Program Gerakan Segoro Amarto tidak maksimal, sehingga harapan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan kemiskinan sangat lambat. Meskipun berbagai cara telah dilakukan. Tetapi masyarakat kurang mempunyai kesadaran untuk bergerak dalam menanggulangi kemiskinan. Diungkapkan juga oleh TKPK Kelurahan Sorosutan sebagai berikut. “..Masyarakat perlu untuk dibina secara baik, karena tanggung jawab, kemandirian, dan kedisiplinan kurang nampak. Sehingga gerobak yang diberi-

kan untuk usaha dijual kembali maka usahanya bangkrut, tetapi ada sebagian usahanya masih berjalan sampai sekarang..”

Dampak sosial ekonomi masyarakat dari Pelaksanaan Program Gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta yaitu, berkembang ekonomi berskala kecil. Pemberian dana bergulir yang dilakukan dalam program ini untuk usaha yang dikembangkan oleh individu cukup berjalan dengan baik. Meskipun pada kelompok sasaran yang dibentuk lebih dari 3-4 orang tidak maksimal, akhirnya mereka berjalan sendiri-sendiri usaha, terkadang ada yang tidak sama sekali, adanya peningkatan pendapatan.

Pelaksanaan program ini membawa dampak yang cukup baik dalam memberantas kemiskinan, padahal dari perencanaan sampai pada pelaksanaan terkadang ada berbagai hambatan-hambatan yang dihadapi baik, eksternal maupun internal. Ini ungkapan oleh TKPK Kota bahwa “..program ini sangat singkat, sehingga targetnya 100% dapat terealisasi 60%, sehingga kemakmuran masyarakat menjadi 5% “. Selain itu, dampak cukup baik karena target 24.000 jumlah penduduk terealisasi 18.000, sehingga mampu mengatasi kemiskinan 5-7% mampu diatasi.

Berdasarkan data di lapangan program ini membawah dampak cukup baik, dilihat berdasarkan tingkat pendidikan pada laporan TKPK Kelurahan Kricak Tahun 2015, yaitu tingkat pendidikan semakin hari semakin baik, dengan melihat kriteria tingkat kelulusan TK sebanyak 2.091 orang, SD 1.149 orang, SMP/SLTA 2.227, SMA/SLTA 4.009, Akadem/D1-D3 672, dan Sarjana (S1-S30 berjumlah 1.675 orang. Selain itu, data dari BPS Tahun 2013 mengenai tingkat pendidikan lebih baik dilihat secara fisik mengenai banyaknya sekolah di Kota Yogyakarta yaitu, SD Negeri 92 buah, SD swasta 76 buah, SMP negeri 16 buah, SMP swasta 43 buah, SMA Negeri 11 buah, SMA swasta 34 buah, SMK Negeri 8 buah, dan SMK swasta 24 buah.

Program ini, berdampak pada tingkat kesehatan cukup baik, karena layanan kesehatan yang diberikan sebagai bagian dari pelaksanaan yang berdampak bagi masyarakat, ini terbukti sejak adanya Program Gerakan Segoro Amarto, dilihat berdasarkan Laporan TKPK Kelurahan bahwa banyak program yang dicanangkan oleh pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan antara lain; (1) bantuan Program PKH, yang bertujuan untuk mening-

katkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu melalui kesehatan anggota keluarganya. Kemudian data dari BPS Kota Yogyakarta cukup membuktikan dengan melihat banyaknya rumah sakit yaitu, RSUD 9 buah, Puskesmas 18 buah, Puskesmas Keliling 14 buah, Puskesmas pembantu 9 buah, Rumah Bersalin 12 buah, dan Klinik 58 buah, sehingga jumlah total layanan Kesehatan Kota Yogyakarta berjumlah 120 buah.

Selain itu, kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Program Gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta, yaitu Kurang adanya komunikasi antara pekerja sosial, sehingga Pelaksanaan PGSA mengalami kendala saat pelaksanaan *pilot project*, ini diakibatkan komunikasi yang terjalin antara pekerja sosial kurang baik. Hal ini diakibatkan tahap persiapan dilaksanakan oleh RW/RT. Tetapi saat anggaran telah teralisasi TKPK Kelurahan mengambil tanpa ada kejelasan yang baik antara kedua belah pihak. Sehingga persiapan yang telah dilakukan oleh RW/RT tidak sesuai dengan perencanaan dan tidak terealisasi secara maksimal. Oleh karena itu, komunikasi yang kurang baik antara pekerja sosial akan berdampak pada program yang dijalankan. Maka basis masyarakat atau penerima program tidak maksimal dalam melaksanakan usaha yang diberikan sehingga program yang dilaksanakan kurang efektif.

Pelaksanaan sosialisasi program yang terlalu cepat dalam waktu yang relatif cepat yaitu kurang dari satu tahun. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman pada pihak pengurus maupun sasaran penerima Program Gerakan Segoro Amarto, sebab penting bagi mereka adalah menerima bantuan berupa dana hibah, sehingga masyarakat kurang memahami tujuan adanya PGSA. Oleh sebab itu, tanggung jawab, kedisiplinan, kepedulian serta kemandirian menurun dengan alasan ini bantuan ini berupa dana hibah, maka tidak bermasalah jika tidak dikembalikan.

Bertumpuknya program dalam masyarakat dengan adanya, berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah bertumpah tindih, sehingga pekerja sosial dalam hal RW/RT kurang fokus terhadap pekerjaan yang diberikan, seperti Program PKH, KMS, BPJS, dll. Hal demikian mengakibatkan pemahaman mengenai PGSA kurang dipahami. Karena setiap program baru dilaksanakan akan mengesampingkan program yang lain, sehingga pelaksa-

naan program kurang maksimal. Ini dipertegas dari hasil oleh RW/RT 08 Kelurahan Tegal panggung bahwa” pengurus RW/RT tidak fokus terhadap program karena bertumpuk, kami merasa rumit dalam pelaksanaan”. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan program Gerakan Segoro Amarto di Kota Yogyakarta.

Usulan tanah program sulit terpenuhi. Program yang dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan selalu mengalami kendala, salah satunya adalah usulan tanah terhadap pembangunan. Hal ini terjadi saat masyarakat diberikan bantuan berupa perumahan swadaya, namun tanah yang ditempati bersifat tanah bukan milik pribadi tetapi tanah pinjaman kepada masyarakat untuk mendirikan bangunan, Sehingga sewaktu-waktu tanah tersebut bisa diambil. Hal demikian yang selalu menjadi suatu problema dalam masyarakat. maka terkadang program yang dicanangkan sulit terealisasi secara maksimal.

Tidak adanya kewenangan penuh dalam pembuatan proposal PGSA. Kewenangan penuh dalam pembuatan proposal tidak ada kejelasan, apakah dibuat oleh pekerja sosial dalam hal ini TKPK Kelurahan sebagai koordinasi program atau pelaksana program (RW/RT) sebab proposal yang dibuat oleh RW/RT pada pelaksanaan PGSA Diambil oleh TKPK, setelah anggaran telah terealisasi, sedangkan proposal dibuat oleh TKPK mengenai usulan program saat terealisasi diambil alih oleh kelompok sasaran program. Oleh sebab itu, perlu adanya ketentuan secara jelas apakah proposal program dibuat oleh sasaran penerima program, RW/RT atau TKPK Kelurahan sebagai koordinasi.

Kurangnya pengawasan pemanfaatan dana. Hal penting yang harus dilakukan dalam pelaksanaan PGSA adalah berkaitan dengan penggunaan dana. Namun, pelaksanaan kurang memperhatikan hal tersebut, sehingga ada beberapa penerima program tidak menjalankan usaha secara maksimal, seperti usahanya mandet, serta penyetor dana tidak tepat waktu yang akan berdampak pada tujuan dari adanya PGSA, sehingga sikap tanggung jawab, kemandirian serta kedisiplinan tidak maksimal terwujud sesuai dengan tujuan dari PGSA

Kurang meratanya daya dukung masyarakat. Program Gerakan Segoro Amarto dikelola langsung TKPK Kelurahan dan pengurus RW/RT mengalami banyak kendala yang disebabkan kurang adanya kepedulian dari pengu-

saha lokal yang berpartisipasi dalam penanggulangan kemiskinan, serta peran masyarakat sebagai pengontrol kurang berdampak. Hal ini, disebabkan peran aktif masyarakat hanya pertama pelaksana program, sehingga partisipasi dalam jangka panjang tidak berdampak, sehingga setiap program yang dilaksanakan pemerintah tidak terealisasi secara maksimal.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disajikan, disampaikan simpulan sebagai berikut. Program Gerakan Segoro Amarto dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai kebutuhan masyarakat Kota Yogyakarta pada Kelurahan Tegal Punggung, Kelurahan Kricak, dan Kelurahan Sorosutan, karena ketiga Kelurahan ini, memiliki kepadatan penduduk cukup besar, tingkat kemiskinan masih tinggi, dan adanya pergeseran nilai gotong royong dalam masyarakat, sehingga sikap kemandirian, kepedulian, kedisiplinan, dan tanggung jawab kurang tampak dalam masyarakat.

Penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan aspek lokalitas diperlukan meninjau kembali mengenai Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011, perlu dicantumkan sanksi tegas terhadap penyalagunaan bantuan pemerintah dalam bentuk dana hibah maupun bukan dana hibah kepada sasaran program dan pada pekerja, sosial, sehingga adanya koordinasi yang intensif antara kedua belah pihak, Pelaksanaan di lapangan jangan berfokus pada bantuan secara tunai berupa fisik, tetapi melibatkan masyarakat untuk bekerja dan berpartisipasi dalam mengerjakan suatu proyek sesuai dengan keahlian yang dimiliki.

Implementasi Program Gerakan Segoro Amarto sangat positif di sambut masyarakat Kota Yogyakarta, terutama sasaran penerimaan program. Sebab pengetahuan masyarakat bahwa, program ini untuk penanggulangan kemiskinan, sehingga ada kesediaan dan partisipasi aktif dalam kegiatan pelaksanaannya, terutama pada *pilot project*, sehingga implementasi yang dilakukan ketiga Kelurahan meliputi: (a) sosialisasi PGSA, (b) pendataan dan pemetaan, (c) penyaluran dana, (d) pengambilan dana, (e) penggunaan dana, (f) monitoring dan evaluasi dan, (g) pelaporan.

Dampak sosial ekonomi pelaksanaan PGSA di Kota Yogyakarta dalam penanggul-

angan kemiskinan cukup baik karena: (a) lingkungan sosial ekonomi cukup baik, (b) berkembangnya usaha ekonomi yang mampu membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, (c) mampu menanggulangi kemiskinan, (d) adanya peningkatan pendidikan, (e) adanya peningkatan kesehatan. Dampak tersebut bersifat positif meskipun pelaksanaannya masih terdapat dampak yang tidak diinginkan.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Gerakan Segoro Amarto dalam penanggulangan kemiskinan antara lain: (a) kurang adanya komunikasi yang baik antara pekerja sosial, (b) sosialisasi program terlalu cepat, (c) bertumpuknya program dalam masyarakat, (d) usulan tanah program sulit terealisasi, (e) tidak adanya kewenangan penuh dalam pembuatan proposal PGSA, (f) kurang adanya pemanfaatan dana, (g) kurang meratanya daya dukung masyarakat.

Berdasar pada simpulan tersebut, dapat disampaikan saran sebagai berikut. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam menangani penanggulangan kemiskinan yang berkaitan dengan aspek lokalitas diperlukan meninjau kembali mengenai Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2011, perlu dicantumkan sanksi tegas terhadap penyalagunaan bantuan pemerintah dalam bentuk dana hibah maupun bukan dana hibah kepada sasaran program dan pada pekerja, sosial, sehingga adanya koordinasi yang intensif antara kedua belah pihak, Pelaksanaan di lapangan jangan berfokus pada bantuan secara tunai berupa fisik, tetapi melibatkan masyarakat untuk bekerja dan berpartisipasi dalam mengerjakan suatu proyek sesuai dengan keahlian yang dimiliki

Kepada TKPK, Perlu adanya penguatan nilai-nilai Gerakan Segoro Amarto pada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), baik tingkat Kota maupun tingkat Kelurahan sampai basis masyarakat, sehingga memiliki dasar dan nilai kepedulian, kemandirian, kedisiplinan serta tanggungjawab yang tinggi, sebelum terjun dan mengajak masyarakat dalam melakukan hal yang sama. Perlu adanya penguatan kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang tertera dalam struktur organisasi, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan sikap maupun keterampilan untuk menjadi panutan dalam masyarakat, perlu adanya pemberian hak penuh dalam pengajuan proposal lebih selektif agar benar-benar tepat sasaran sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, da-

lam proses sosialisasi program sebaiknya menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar, sehingga benar-benar mengetahui tentang PGSA dan mensukseskan keberhasilan program dan pelaksanaan program yang serius, terfokus dan berkelanjutan tidak sekedar mengacu pada *pilot project* (anggaran) baik dari kualitas sasaran dan kualitas.

Kepada Pengusaha dan Masyarakat per-lu membangun komunikasi yang baik antar masyarakat, sehingga menumbuhkan nilai kepedulian kepada sesama, dan dapat merasakan apa yang dirasakan, sehingga mempunyai hati untuk bergerak dalam membantu sesama masyarakat

Daftar Pustaka

- Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta. (2013). *Badan perencanaan pembangunan daerah kota yogyakarta: Modul pelatihan parameter gerakan segoro amarto*. Yogyakarta: Badan Perencanaan Daerah Kota Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2015b). *Indikator kesejahteraan sosial: Welfare indicators*. Jakarta-Indonesia: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik Indonesia (2015a). Diakses tanggal 09 November 2015 dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494>
- Baum, F., & Duvnjak, A.. (2013). The Politics of Poverty in Australia. *Journal Alternative*, 32(1), 12-18
- Bebbington, A. J., Mitlin, D., Mogaladi, J., Scurrah, M., & Bielich, C. (2010). Decentring poverty, reworking government: Social movements and states in the goverment of poverty. *Journal of development studies*, 46, 7, 1304–1326.
- Capano, G., & Howlett, M. (2015). *Design and non-design in policy-making:when and policy design matters*: Proposal for a workshop ECPR joint sessions of workshops Warsaw, Poland. Diakses pada tanggal 19 November 2015.
- Fischer, F. M., Miller, G. J., & Sidney, M. S. (2015). *Handbook kebijakan publik*. Bandung: Nusa Media.
- Fitzpatrick, J. L., Sanders, J. R., & Worthen, B. R. (2011). *Program evaluation: alternative approach and pratical guidelines*. New Jersey: Perarson Education Inc.
- Geurts, T. (2014). *Public policy making:The²¹ Century perspective*.The Netherlands: Be Informed.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan publik :Proses, analisis, dan partisipasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lasmawan, W & Suryadi, M. (2012). Pengembangan model pengentasan kemiskinan berbasis nilai-nilai nyamabraya (Ajaran tatwamasi) pada masyarakat perkotaan di provinsi bali. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Indonesia. *Journal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1, 2303-2898.
- Lynam, S. (2006). *Comunity development and public policy*: Combat poverty agency.
- Martens, M. D. (2010). *Research and evalution in education and psychology integrating diversity with quantitative, qualitative and mixed method*. (3rd Ed.). Washington Dc: Galadent University.
- Michaud. (2011). *Public policy: secret et enjeux de administration publique*. Quebec: Press de University Laval
- Paudel, N. R. (2009). *Health policy implementation in Nepal: Some dilemmas*. Central Department of Public Administration, Public Administration Campus. Tribhuvan University Kathmandu: Nepal.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan dalam Penanggulangan Kemiskinan. (2014).
- Sirma, D. S., & Jenkins, S. P. (2013). Poverty trends in Turkey. Discussion Paper No. 7823 December 2013 diselenggaraan oleh Department of

- Social Policy London School of Economics Houghton Street London, WC2A 2AE United Kingdom.
- Supriyanto (2006) Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan. *Journal Ekonomi & Pendidikan*,3(1).
- Tantoro, S. (2014). *Pembasmian kemiskinan prespektif sosiologi – antropologi*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- vom Hau, M., & Wilde, G. (2010). We have always lived here: indigenous movements, citizenship and poverty in Argentina. *The Journal of Development Studies*, 7, 1283-1303
- Walikota Yogyakarta. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53, Tahun 2011, tentang gerakan Segoro Amarto. (2011)
- Wodon, Q. T. (1999). *Growth, poverty, and inequality: A regional panel for bangladesh, the world bank, policy reasearch working paper*, March 2007.